

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan temuan analisis data dan hasil pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan dalam studi ini, terkait pengaruh Pajak Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada 33 provinsi di Indonesia untuk periode 2020–2024, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam membiayai layanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sosial, yang pada akhirnya mendorong peningkatan IPM secara langsung.
2. Kondisi ini mengindikasikan bahwa besarnya output ekonomi suatu daerah tidak secara otomatis diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup masyarakat yang merata, terutama dalam kondisi ketimpangan distribusi pendapatan antarprovinsi yang masih tinggi.
3. Arah hubungan yang bertentangan dengan prediksi teoritis ini dapat dijelaskan melalui mekanisme *reverse causality*, di mana Dana Alokasi Umum yang lebih besar justru dialokasikan kepada daerah-daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia rendah sebagai wujud fungsi ekualisasi, serta adanya fenomena *flypaper effect* yang menunjukkan bahwa dana transfer tidak selalu digunakan secara efektif untuk meningkatkan layanan publik pembentuk IPM.

4. Meskipun Dana Alokasi Khusus dirancang secara khusus untuk mendanai sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, dampaknya terhadap Indeks Pembangunan Manusia belum terukur secara signifikan dalam periode pengamatan. Hal ini dipengaruhi oleh pergeseran komposisi Dana Alokasi Khusus selama masa pandemi *Covid-19* serta keterlambatan penyerapan anggaran yang kerap terjadi di daerah dengan kapasitas administratif terbatas.
5. Implikasi dari temuan ini adalah bahwa sistem fiskal daerah secara holistik, yang mencakup kombinasi penerimaan pajak mandiri, kapasitas ekonomi, dan transfer fiskal dari pemerintah pusat, memiliki relevansi yang signifikan dalam menjelaskan variasi pembangunan manusia antardaerah di Indonesia.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian, antara lain:

1. Empat provinsi hasil pemekaran Papua, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya, tidak dapat diikutsertakan dalam sampel penelitian karena data fiskal dan IPM keempat provinsi tersebut belum tersedia secara lengkap dan konsisten pada sumber resmi BPS maupun DJPK sepanjang seluruh periode pengamatan 2020–2024. Keterbatasan ini menyebabkan temuan penelitian kurang dapat merepresentasikan kondisi pembangunan manusia di wilayah Papua secara menyeluruh.
2. Provinsi DKI Jakarta harus dikeluarkan dari sampel karena tidak menerima Dana Alokasi Umum (DAU) secara penuh akibat statusnya sebagai ibu kota negara dengan kapasitas fiskal tertinggi di Indonesia.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijabarkan, peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan metode data panel yang lebih canggih seperti Fixed Effects Model (FEM) atau Random Effects Model (REM) guna mengakomodasi heterogenitas antarprovinsi yang tidak teramati, sehingga estimasi yang dihasilkan lebih akurat dibandingkan pendekatan OLS yang diterapkan dalam penelitian ini. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel kontrol yang relevan seperti belanja modal bidang pendidikan dan kesehatan, tingkat kemiskinan, atau Gini Ratio agar kemampuan penjelas model meningkat secara substansial. Apabila data keempat provinsi hasil pemekaran Papua telah tersedia secara lengkap, penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan keempat provinsi tersebut ke dalam sampel misalnya melalui perlakuan variabel dummy sehingga temuan lebih merepresentasikan kondisi seluruh wilayah Indonesia termasuk kawasan timur.